

# HALO SKALA

## Selamat datang pada edisi perdana HALO SKALA

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah program kemitraan Australia–Indonesia yang mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan layanan dasar di daerah tertinggal.

Edisi ini mengangkat tema Integrasi Data — fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berbasis bukti. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, keterpaduan data lintas sektor dan tingkat pemerintahan menjadi kunci layanan publik yang lebih tepat sasaran.

Melalui Halo SKALA, kami berbagi cerita, pembelajaran, dan praktik baik dari wilayah dampingan, serta mengajak kolaborasi untuk memperkuat transformasi tata kelola data di Indonesia.



## RISALAH KEBIJAKAN



### Pembelajaran dari Implementasi Regsosek di Daerah: Sebuah Masukan untuk Implementasi Kebijakan DTSEN

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menandai langkah penting dalam pengelolaan dan ekosistem data di Indonesia. DTSEN dibangun di atas fondasi arsitektur data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) serta sistem-sistem pendataan lain. Pengembangan DTSEN perlu mengantisipasi tantangan dan permasalahan dalam pembangunan sistem-sistem data yang sudah/pernah ada, antara lain: belum adanya desain pemutakhiran sistem satu data yang teruji efektif; belum lengkapnya regulasi tentang pedoman, tata kelola, dan mekanisme koordinasi lintas kelembagaan yang melakukan pemutakhiran hingga verifikasi dan validasi data lintas tingkatan di daerah; terbatasnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia; serta terbatasnya anggaran pemutakhiran data, khususnya di daerah perdesaan tertinggal, terpencil, dan kepulauan. Risalah kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pembelajaran dari pelaksanaan uji coba pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh Bappenas dan BPS, serta menyusun rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan guna mendukung kelancaran dan penyempurnaan proses pemutakhiran data ke depan.

[Lihat Selengkapnya](#)



## Booklet

# Data untuk Pembangunan: Kolaborasi Menuju Indonesia yang Inklusif

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas data serta ketepatan sasaran program bantuan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sinergi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan integrasi dan validasi tiga data utama terkait kemiskinan—Regsosek, DTKS, dan P3KE—hingga ke tingkat masyarakat. Dengan langkah ini, penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan memperkuat keadilan sosial di tengah masyarakat.

Pembangunan inklusif di Indonesia sangat membutuhkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat diandalkan. Praktik kolaborasi yang diterapkan di NTT menjadi contoh nyata bagaimana integrasi data sosial ekonomi dapat mempercepat pencapaian layanan dasar yang inklusif. Melalui validasi dan pemanfaatan data yang komprehensif, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini tidak hanya mendukung pengurangan kemiskinan, tetapi juga memperluas keadilan sosial.

Keberhasilan NTT sebagai proyek percontohan kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan dan stunting diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Dengan membangun ekosistem data yang solid, kolaboratif, dan berkelanjutan, Indonesia dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

[Lihat Selengkapnya](#)



## Video

# Mewujudkan Pembangunan Inklusif Melalui Kebijakan dan Program yang Tepat Sasaran

Video ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas data untuk pembangunan yang inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satunya melalui paduan tiga data utama terkait kemiskinan (Regsosek, DTKS, dan P3KE) untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, mendukung pengurangan kemiskinan, dan memperluas keadilan sosial di Masyarakat.

[Lihat Selengkapnya](#)

# Satu Data Daerah

## Satu Data Aceh:

### Menuju Pemerintahan Berbasis Data .....

Satu Data Aceh adalah inisiatif strategis Pemerintah Aceh dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, serta menjadi salah satu program unggulan Gerak Cepat (Quick Wins) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2025-2029.

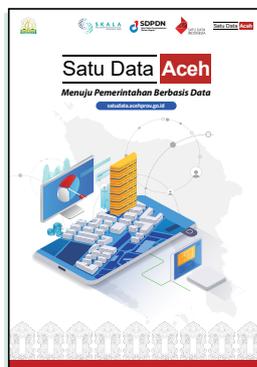
Program ini bertujuan menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan berbasis data.

#### VIDEO INFOGRAFIK



Lihat Selengkapnya

#### LEAFLET



Lihat Selengkapnya

## Satu Data Kalimantan Utara:

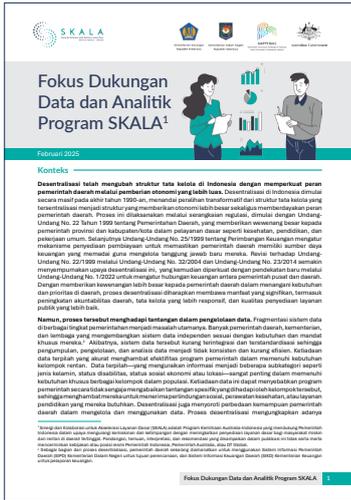
### Maju, Makmur, Berkelanjutan .....



Lihat Selengkapnya

#### Video

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024, Gubernur Kalimantan Utara menegaskan komitmen pada tata kelola pemerintahan berbasis data melalui Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Melalui regulasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong kebijakan yang responsif melalui perencanaan yang akurat berbasis data dan partisipatif serta sebagai bukti komitmen kuat untuk membangun sistem data yang terpadu dan terpercaya.



PUBLIKASI

Fokus Dukungan Data dan Analitik Program SKALA

Program SKALA berupaya memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan data untuk meningkatkan tata kelola di daerah tertinggal di Indonesia, serta dalam menyediakan layanan dasar yang inklusif dan merata di provinsi wilayah implementasi program. Program ini mengedepankan pentingnya data yang andal/akurat untuk mendukung tata kelola yang efektif, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi tantangan tata kelola data melalui pendekatan komprehensif untuk memperkuat kerangka Data dan Analitik.

Lihat Selengkapnya



PUBLIKASI

Satu Data Kalimantan Utara: Menuju Kalimantan Utara yang Terintegrasi

Satu Data Kalimantan Utara merupakan kebijakan penyediaan data Akurat Terpilah dan Berkualitas dapat dibagipakaikan serta mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Kalimantan Utara yang Inklusif.

Lihat Selengkapnya

ARTIKEL

Nusa Tenggara Barat Mendorong Inovasi Data untuk Layanan Dasar yang Tahan Iklim



Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (2024) mencatat bahwa permukaan laut naik lebih cepat sejak abad ke-20 dibandingkan abad-abad sebelumnya. Di Indonesia, kenaikannya mencapai 0,8 hingga 1,2 cm per tahun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi realita bagi daerah pesisir seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 5,56 juta penduduk dan 42% di antaranya tinggal di kawasan pesisir. Kenaikan permukaan air laut adalah sinyal untuk segera bertindak dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Lihat Selengkapnya



- Silakan share newsletter ini
www.skala.or.id
communications@skala.or.id
Whatsapp Channel SKALA

Kantor SKALA
IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920